

**PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH
PEMULA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019**

**(di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Oleh:

RISKA HARDIANTI

NIM : 0404161005

PROGRAM STUDI : PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

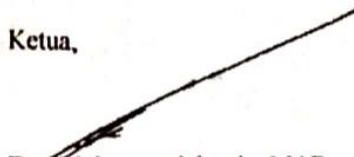
PENGESAHAN

Skripsi berjudul "PARTISIPASI POLITIK dan PERILAKU PEMILIH PEMULA dalam PEMILIHAN PRESIDEN 2019 di KELURAHAN PEKAN BESITANG KABUPATEN LANGKAT" atas nama RISKHA HARDIANI Nim 0404161005 program studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 07 Agustus 2019.

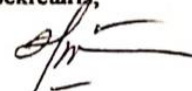
Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.


Medan, 13 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S.1)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua,


Drs. Muhammad Aswin, MAP
NIP. 19680817 200312 1 003


Sekretaris,

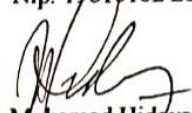

Siti Ismahani, S.Ag. M.Hum
NIP.19690503 199903 2 003


1. Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 196507051993031003


3. Drs. Abu Syahrin, M.Ag
NIP. 196710272000031002

Anggota Penguji


2. Dr. Junardi, M.Si
Nip. 19810102 200912 1 009


4. Muhamad Hidayat, S.Ag. M.A
Nip. 19620821 199503 2 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara Medan


Prof. Dr. Katimin, M. Ag
Nip. 19650705 199303 1 003



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PARTISIPASI POLITIK DAN PRILAKU PEMILIH PEMULA DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KELURAHAN PEKAN BESITANG
KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA**

Oleh :

RISKA HARDIANTI
NIM : 0404161005

Dapat Disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 (S.1) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushulludin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara

Medan

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag
NIP: 196507051993031003

Pembimbing II

Dr. Junaidi, M.Si
NIP: 198101022009121009

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang Ditugaskan Untuk Membimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Riska Hardianti
Tempat/Tgl.Lahir : Besitang, 23 Agustus 1998
NIM : 0404161005
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : **Partisipasi Politik Dan Prilaku Pemilih Pemula
Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kelurahan
Pekan Besitang Kabupaten Langkat
Sumatera Utara**

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Medan, November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag
NIP: 196507051993031003



Dr. Junaidi, M.Si
NIP: 198101022009121009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Hardianti
NIM : 0404161005
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tempat/Tgl.Lahir : Besitang, 23 Agustus 1998
Alamat : Jl. Lintas Aceh-Sumatera Kampung Lalang Lingkungan II

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : *“Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemuda dalam Pemilihan Presiden 2019 di (Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara)”* benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, November 2020

Yang membuat pernyataan


RISKA HARDIANTI
NIM : 0404161005

Nama : Riska Hardianti
NIM : 0404161005
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Pembimbing I : Prof.Dr. H.Katimin, M.Ag
Pembimbing II : Junaidi,M.Si
Judul Skripsi : **Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2019 di (Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Sumatera Utara)**

ABSTRAK

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Kelurahan Pekan Besitang. menjelaskan mengenai partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik dan perilaku politik pemilih pemula dalam menentukan pilihan politiknya pada Pemilihan Umum Presiden 2019 serta untuk mengetahui faktor pendukung dalam pilihan politik pemilih pemula.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi politik yang ada di Kelurahan Pekan Besitang sangat rendah. Kurangnya rasa peduli pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan umum. Perilaku yang kecenderungan ada pada pemilih pemula yaitu rasional dan lingkungan keluarga. Ada yang mencari tahu sendiri dan ada juga dipengaruhi oleh keluarga sekitar. Peran pemilih pemula begitu penting dalam pemilu, Sebab jumlah mereka lumayan banyak untuk pemilihan Presiden. Pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang mereka lebih bnyak tidak ikut dalam memilih. Karena tidak melakukan dan juga menggunakan hak pilih dalam pemilihan Presiden 2019 disebabkan karena tingkat pengetahuan mereka sanagt minim terkait tentang teknis dalam pemilihan.

Kata kunci : Partisipasi Politik, Perilaku, Pemilih Pemula.

KATA PENGANTAR



Assalamua 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa memberikan segala rahmat dan karunianya, hingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul “*Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2019 (di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara)*” dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya. Dan tidak lupa pula Sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan buat kita semua, terkhusus buat peneliti, semoga nantinya kita senantiasa mendapat pertolongan di Yaumul Ma’^{as}ar kelak, Amin Yarobbal Alamin.

Skripsi ini ditulis guna sebagai syarat untuk semester akhir guna mencapai gelar, dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terealisasi secara baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin memberikan penyampaian berupa ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Muhammad Khaidir dan Ibunda Khairani Nst dan juga abangda Khairil Amri, Amd dan abangda RizkiHariadi S.H yang selalu memberikan Doa dan Nasehat yang tidak putus- putus diberikan kepada penulis dan seluruh keluarga penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara dan juga sebagai pembimbing pertama saya.
4. Bapak Drs. Muhammad Aswin, M. Ap selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam dan Bapak Muhammad Hidayat, M.A selaku Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Study Islam yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis..
5. Bapak Junaidi, M.Si sebagai pembimbing kedua saya yang memberikan motivasi dan juga membantu menyelesaikan skripsi saya.
6. Rekan-rekan Rumah Juang Nurul Fahmi Silitonga, Vivi Andri Syapira, dan Ike Purnama Sari Nst, Syaripuddin, dan juga Ahmad Fahroji yang sering memberikan dukungan penuh kepada penulis baik berupa semangat maupun motivasi.
7. Terimakasih kepada Aulia Darmawan yang senantiasa memberikan semangat, arahan, penghibur untuk penulis dalam mengerjakan Skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi dapat memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan untuk semuanya.

Medan, Oktober 2020

Penulis

RISKA HARDIANTI

0404161005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penelitian	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Pengertian Politik	11
B. Pengertian Partisipasi Politik dan Pemilih Pemula	18
C. Tujuan Partisipasi Politik.....	20
D. Model Perilaku Pemilih	
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	22
A. Letak Geografis Kelurahan Pekan Besitang	22
B. Keadaan Demografis Kelurahan Pekan Besitang	25
C. Pemilihan Umum 2019.....	27
D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	28
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Partisipasi Politik pemilih pemula di kelurahan pekan Besitang	30
B. Faktor Pendukung Pilihan Politik Responden	31
C. Pandangan Politik Islam Terhadap Partisipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan PresiTahun 2019 di Kelurahan Pekan Besitang...	37
BAB V: PENUTUP	44
A. Kesimpulan	50
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah satu negara yang menjalankan dengan sistem demokrasi, maka dari itu partisipasi sangat erat kaitannya dengan demokrasi. Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada setiap warga negara dalam proses mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pada umumnya partisipasi merupakan kegiatan kelompok ataupun perorang untuk ikutserta secara aktif di dalam kehidupan politik, dengan salah satu cara dalam memilih pemimpin, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*publicpolicy*).¹

Pemilu merupakan perhelatan, sebuah pesta rakyat menciptakan untuk negara agar masyarakat dapat memilih pemimpin secara langsung agar konflik tidak menjadi semakin brutal. Pemilu merupakan representasi keadaban sebuah bangsa dimana para pemimpin dipilih bukan dengan cara baku hantam, senjata, maupun brutal. Tetapi melalui kotak suara. Demokrasi yang bertumpu pada rakyat berhenti pada kotak suara. Suara adalah bukti dukungan, ia berkenan dihati rakyat, berkenaan dengan etis.²

Di Indonesia pemilu pilpres dilaksanakan pada tahun 2019, memasuki pada tahun pemilu tersebut, hiruk pikuk politik semakin memanaskan situasi. Para kandidat yang maju didalam pilpres yang maju kali ini berusaha dengan keras mengambil empati dan merayu rakyat agar mau memilihnya. Politik demokratis ditujukan untuk menciptakan imaji pertautan baru bagi warga masyarakat.

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2010), h. 367

² Faisal Riza, *Partai Islam No, Politik Islam Yes*, (LKis :Yogyakarta,2019), h.122

Demokrasi merupakan salah satu wujud nyata dalam sejatinya diidealkan sebagai tempat pencarian titik temu ragam kepentingan yang seliweran dalam masyarakat plural yang sulit ditemukan. Demokrasi dan juga menjadi tempat bagi warga masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap negara dan juga pemerintahan. pemilu dilakukan dengan cara bebas, langsung, adil, dan juga terpecah dalam negara. Tidak ada unsur paksaan dari manapun, dalam memilih dengan melihat visi dan juga misi calon pemimpin, bagaimana cara dia melibatkan rakyatnya dalam berkampanye, dan yang paling penting harus tau bagaimana latar belakang sebagai calon pemimpin. Pemimpin adalah sesuatu yang sangat diperlukan, bahkan menjadi syarat utama bagi eksistensinya sebuah negara.

Partisipasi politik adalah salah satu bagian yang begitu paling penting pada susunan suatu negara demokrasi itu merupakan suatu ke khasan dari keseimbangan pada politik. Partisipasi politik ialah proses yang tidak akan terlepas dari media dan juga pengaruhnya seperti keluarga, desakan pressure group dan juga lingkungan. Informasi politik tersedia di dalam televisi maupun surat kabar, tetapi, perhatian kepada informasi politik dari media awalnya karena tumbuhnya perhatian politik di dalam keluarga melalui politisasi keluarga. Tingkat partisipasi juga dapat ditentukan oleh lingkungan.

Dalam kegiatan partisipasi politik masyarakat di arahkan ikut berperan dalam mengambil alih menyertakan diri dalam mempromosikan dirinya. pemilih pemula merupakan masyarakat ataupun warga negara yang usianya telah mencapai 17 tahun yang masih pelajar ataupun yang sudah menikah. Secara harfiah, pada pemilih pemula orang-orang yang baru mempunyai hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu. Kebanyakan dari mereka rentang usia 17 tahun hingga 21 tahun.

Pemilih pemula mereka memiliki potensi dalam memperoleh suara pada saat pemilu.

Biasanya pemilih pemula adalah seorang pelajar, pekerja muda, bahkan mahasiswa. Pada partisipasi politik pemilih pemula di anggap menjadi objek pembinaan karena mereka di anggap memerlukan bimbingan dan juga pengetahuan dalam bidang politik. Dapat disimpulkan bahwasannya mereka dapat menghasilkan potensi meningkatkan suara. Karena mereka masih membutuhkan bimbingan dan juga pengetahuan dalam pemilihan umum, mayoritas mereka mrngndalkan dari pengetahuan yang mereka dapatkan dari lingkungan dan juga akan mencari sendiri. Mereka akan melakukan aktivitasny dengan cara ikut dalam memberikan suara pada pemilu.

Pemilihan umum atau sering disebut sebagai pemilu adalah cara pada negara memberikan hak pada setiap warganya ikut serta dalam memilih langsung pemimpin pada negara tersebut. Masyarakat memilih dengan bebas dalam pemilu. Pada suatau sistem pemerintahan, pemilu adalah cara untuk memilih wakil rakyatnya yang akan duduk di kursi lembaga legislatif maupun eksekutif sesuai dengan pilihan masyarakat.

Seperti yang terdapat pada Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pada pemilu menyatakan pemilihan umum merupakan tempat pelaksanaan kedaulatan untuk rakyat yang dilakukan dengan langsung, bebas, jujur, dan juga adil di setiap negara. Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada pancasila dan juga Undang-Undang dasar 1945. Pemilihan umum berarti penyelesaian dan penyerahan seutuhnya kedaulatan di tangan

rakyat. indikator dengan mengikut sertakan rakyatnya dalam sebuah sistem pada negara.

Pemimpin yang dinilai baik, mengutamakan pada memenuhi janji, dukungan dan juga penghargaan sebagai teknik motivasi dan juga tindakan dengan cara yang baik, membantu, dan juga memperhatikan kepada bawahannya.³ Penguasa yang buruk seperti memberi tidak bermoral, berperilaku tidak baik, hanya memikirkan diri sendiri tidak memikirkan bawahannya. Seperti yang dijelaskan pada surah al-maidah ayat 48 - 49:

وَلَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ
 أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

بِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ
 أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

بِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ
 أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

وَلَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ
 أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

بِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ
 أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

وَلَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ
 أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan Kami telah menurunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan juga ujian oleh kitab-kitab yang lain itu maka

putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami memberikan

³ menurut Wayne Pace (2000),

*peraturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu selisihkan.*⁴

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam peneliti ini ialah:

1. Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih pemula dalam pilpres di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara?
3. Bagaimana perilaku pemilih pemula dalam pemilihan Presiden di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara?

⁴ Q.S Al- Maidah 48.

⁵ Q.S Al-Maidah 49

C. Batasan Istilah

Dengan tidak menimbulkan perdebatan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Maka peneliti dapat menguraikan beberapa batasan istilah yaitu Sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik

Partisipasi yaitu berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakana, ikut serta mengambil bagian. Pengertian sederhana adalah masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan juga pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi merupakan gejala pada demokrasi dan dimana mengikut sertakan segala perencanaan dan juga pelaksanaan hingga terlaksana, segala yang memikul tanggung jawab dalam ikut andil pada kewajibannya.⁶

Dari penjelasan di atas bahwasannya partisipasi memiliki arti yang beragam dan juga luas. Inti dari penjelasan semuanya dapat di ambil kesimpulan bahwa partisipasi menjadi wujud nyata warga negara berperan dalam aktivitas berubah konsep agar tercapainya pembangunan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berupa saran dan juga jasa, atau juga pada materi baik itu langsung maupun secara dengan tidak langsung pada suasana yang demokratis.

2. Politik

Politik adalah seni keterampilan dalam mengasah strategi untuk meraih kekuasaan, secara sederhana politik bisa dikatakan sebagai metode, teknik, dan

⁶ Menurut Soerganda Poerbakawatja.

juga pengetahuan untuk mempengaruhi semua masyarakat serta kelompok masyarakat atau individu.⁷

Politik ialah bagian dari kehidupan manusia, tidak ada politik maka kehidupan masyarakat dan Negara tidak akan ada artinya. Politik adalah alat untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan lahirnya suatu Negara, bahkan kedaulatan Negara.

3. Perilaku

Sikap ataupun sering disebut sebagai perilaku merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh adat, genetika, keluarga, dan juga lingkungan . Segala macam interaksi maupun pengalaman dari wujud nyata dalam tindakan oleh seseorang.

Perilaku ialah respon ataupun interaksi individu kepada individu lain ataupun kelompok yang ada pada dirinya. Ini dapat berbentuk pasif ataupun aktif.

4. Pemilih Pemula

Dalam UU No. 10 tahun 2008 dalam bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta 20 bahwa pemilih pemula merupakan masyarakat Indonesia pada saat pemilu atau pemungutan suarat adalah masyarakat Indonesia yang usianya telah mencapai 17 ataupun lebih dan tidak di atas 23 tahun pelajar, mahasiswa, maupun yang sudah menikah mempunyai hak sebagai pemilih yang mana pada sebelumnya ia belum pernah ikut dalam memilih dan termasuk dalam ketentuan dalam Undang- Undang.⁸

5. Pemilihan Presiden 2019

⁷ Menurut Penulis

⁸ Teti Estiasih, "pemilih pemula dalam pemilu", dalam berita arsip Vol.20 No.5, 2016,(Surabaya :Kpud) h. 2

Pemilihan Presiden atau sering di dengar dengan pilpres sudah ada pada Undang-Undang No. 42 pada tahun 2008 mengenai pilpres dan juga wakilnya dan tercantum pada pasal 1 ayat 1 yaitu ketentuan yang bunyinya :” pilpres dan wapres, selanjutnya disebut juga pemilihan Presiden, merupakan pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1945.

6. Kelurahan Pekan Besitang

Kelurahan pekan Besitang adalah kelurahan yang berada di kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan ini terletak antara Desa Bukit Selamat dan Kelurahan Bukit Kubu. Dengan kode pos 20859.

Kelurahan pekan Besitang terdapat sebelas lingkungan, dimana setiap lingkungan mempunyai kepala lingkungan yang dipilih langsung oleh warga setiap lingkungannya dan akan disetujui oleh lurah Kelurahan Pekan Besitang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan Bagaimana partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
2. Menjelaskan atau mendeskripsikan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula dalam pilpres di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
3. Mengetahui Bagaimana perilaku pemilih pemula dalam pemilihan Presiden di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Mahasiswa
 - a. Bisa menambah pengetahuan yang berhubungan pada perilaku politik pemuda khususnya di Kelurahan Pekan Besitang .
 - b. Dapat menambah pengetahuan dampak ikut sertanya pemilih pemula dalam pilpres 2019 di Kelurahan Pekan Besitang.
2. Bagi Pemerintah Kelurahan pekan Besitang Sumatera Utara
 - a. Memberikan informasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Kelurahan Pekan Besitang.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk mengevaluasi Kebijakan terhadap partisipasi untuk pemilih pemula.
3. Sebagai pengembangan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian.

F. Metode Penelitian

Pada metode yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan juga menggambarkan kondisi objek dan subjek penelitian, berdasarkan keadaan yang terbaru dan juga terpecah dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan informasi yang memuat tentang gambaran secara akurat dan terstruktur berdasarkan fakta yang ada. Teknik ini dapat mempermudah penelitian sehingga peneliti dapat mensetting dan menajamkan nilai dan pola yang dihadapi nantinya dalam penelitian ini.

1. Lokasi Penelitian

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi ini tempat peneliti tinggal, akses dari lokasi meneliti dan juga peneliti juga tidak terlalu jauh sehingga dapat memudahkan peneliti dalam observasi. adapun alasan lain adalah lokasi ini memiliki pemuda yang cukup banyak namun mereka kurang dalam mengetahui bagaimana memilih pemimpin, dapat dibilang kesadaran diri dalam mengikutsertakan partisipasinya dalam memilih juga sangat kurang.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan data utama peneliti dapatkan langsung dari para pemilih pemula pemilihan Presiden di Kelurahan Pekan Besitang. Data – data tersebut merupakan pokok yang peneliti dapatkan melalui wawancara. peneliti memberi pertanyaan dengan para informan menyangkut data-data yang diperlukan dengan cara bertemu langsung atau bertatap wajah antara peneliti dengan narasumber tersebut atau orang yang diwawancarai ataupun peneliti meminta data dan dokumen secara langsung kepada petugas pemerintahan Kelurahan Pekan Besitang.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder merupakan data pendukung merupakan sumber data kedua yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang data – data tersebut peneliti peroleh melalui buku-buku, ataupun hal-hal yang bersangkutan pada setiap peneliti lakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data maka keaslian dan kebenaran data merupakan komponen utama dilakukan dalam suatu penelitian. Tahapan pengumpulan data adalah suatu proses dalam metode penelitian ilmiah yang harus melalui tahapan-tahapan sistematis dan logis melalui proses pencarian data akurat, baik dari data primer (langsung dari informan) maupun dari data sekunder (data dari sumber kedua).⁹

Adapun teknik yang digunakan pada penelitian pengumpulan data dipakai agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap data yang dibutuhkan yaitu melalui wawancara, dokumentasi serta observasi di lapangan.

G.Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I. Bab ini membahas tentang latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.
2. BAB II. Bab ini membahas mengenai landasan teori yang berisikan tentang pengertian politik, partisipasi politik dan pemilihan pemula, model perilaku pemilihan dan tujuan partisipasi politik.
3. BAB III. Bab ini berisikan mengenai lokasi penelitian yang berisikan mengenai letak geografis Kelurahan Pekan Besitang, keadaan geografis Kelurahan Pekan Besitang, pemilihan Presiden (pilpres), dan juga komisi pemilihan umum (kpu).

⁹ Salim & Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h.113

4. BAB IV. Bab ini berisikan mengenai hasil dari penelitian dan juga pembahasan yang berisikan tentang Partisipasi Politik pemilih pemula di kelurahan pekan Besitang, perilaku pemilih pemula dlalam pemilihan Presiden di Kelurahan Pekan Besitang, Faktor Pendukung Pilihan Politik Responden, pandangan Politik Islam terhadap partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan umum Presiden di Kelurahan Pekan Besitang.
5. BAB V. Bab ini berisikan penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran-saran yang peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Politik

Ketika mengkaji lebih dalam dunia politik yang ada pada Indonesia, mengenai pada kehidupan yang sangat kompleks dan rumit. Hal ini karena Indonesia sedang berada pada fase yang begitu kelam di dalam dunia perpolitikan, diawali masa merdeka Indonesia yaitu masa orde lama hingga dilanjutkan pada masa orba atau orde baru hingga masa reformasi pada masa 1998 berjalan hingga saat ini. Sistem perpolitikan di Indonesia kian berubah hingga di masa transisi yang dahulunya lebih berbentuk otoriter masuk sehingga masuk pada sekarang kearah yang dikenal dengan Demokrasi.

Politik ialah bagian dari kehidupan manusia, tidak ada politik maka kehidupan masyarakat dan Negara tidak akan ada artinya. Politik adalah alat untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan lahirnya suatu Negara, bahkan kedaulatan Negara, menurut Andrew Heywood menyebut empat pandangan tentang politik yaitu:

1. Politik sebagai seni
2. Politik sebagai hubungan publik
3. Politik sebagai kompromi dan konsensus
4. Politik sebagai kekuasaan.¹⁰

¹⁰ Jubair Situmorang, *Etika Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Desember, 2016)

Politik adalah seni keterampilan atau metode dan cara menjalankan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas kekuatan, strategi atau mengasah kekuatan, dan menerapkannya dalam hal mencapai tujuan kekuasaan tertentu dalam urusan pemerintahannya dan instansi lainnya. Pada konteks dalam ilmu politik terdapat dua tingkatan ilmu.¹¹

Yang pertama, ilmu politik yang membahas rumusan istilah dalil-dalil yang membantu mendeskripsikan proses dan alur politik yang berlangsung, penyediaan cara atau tatacara instan dalam konsep dan sarana pengamatan terhadap politik atau kuasa politik terdapat aktivitas hubungan antara manusia, penjelasan dari berbagai ideologi dan nilai politik pada penerapan masing-masing.

Kedua, filsafat politik merupakan salah satunya mengenai sikap politik, filsafat politik bersifat metasains, tidak mengkaji realita secara langsung namun memikirkan realita secara ilmu pada politik. Menuntut politik legitimasi politik mengendalikan mengenai realita politik, kemauan masyarakat dapat menjadi efektif dalam mengambil kebijakan yang konkret. Politik juga tidak terlepas yang namanya kekuasaan, jadi kalau berbicara tentang politik pasti ada maksud dan tujuan di dalamnya melainkan kepentingan sekelompok orang.

Pada suatu sistem politik ketatanegaraan menaati adalah suatu begitu yang diperlukan dan juga dasar. Tanpa adanya ketegasan dalam negara, negara tidak

¹¹ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Dramedia Pustaka Utama, 2008), h.13

akan ada apa adanya jika warga negara tidak mengikuti aturan dalam Undang – undang yang dibuat tidak di taati.¹²

Jika dilihat politik dengan orang yang menjalaninya dimana makna pada politik dibagi menjadi dua yang pertama adalah kepentingan dan juga kepentingan umum yang dalam arti pada kebijaksanaan. Mau itu dari negara maupun pada daerah.

Kepentingan politik dalam arti kebijaksanaan dikaitkan dengan usaha dalam memberikan keputusan dan juga peraturan yang ada dan bisa diterima oleh setiap masyarakat, membuat warga negara menjadi kearah yang lebih baik lagi dalam kehidupan. Usaha pada *the good life* berarti mengenai berbagai macam segala kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan berjalannya tujuan prioritas yang telah di tentukan. Namun, pada masa itu akan dapat menimbulkan masalah – masalah biasanya mental dan juga materil. Biasanya yang baik akan susah untuk didapatkan.¹³

Dalam pandangan yang lain, di negara demokrasi, pelaksanaan ini harus dibutuhkan kerjasama untuk menyelesaikan konflik yang ada di negaranya. Pada hal ini politik pada umumnya dilihat dari bagaimana cara menyelesaikan konflik, ataupun konsensus.

Secara universal politik bisa disimpulkan adalah suatu bentuk usaha agar peraturan yang telah dibuat dapat diterima oleh seluruh rakyat dibangsa ini, agar terciptanya rakyat yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan pengertian politik secara sederhana dapat diartikan adalah cara, teknik atau strategi untuk

¹² Prof.Dr.Katimin, *Politik Islam*, (Medan: Perdana Publising, 2017), h. 5

¹³ Mariam Budiarjo, *Dasar...* h. 16

mempengaruhi individu maupun orang banyak. Politik merupakan pekerjaan sangat berhubungan dengan bagian membuat kebijakan yang ada didalam masyarakat dan publik, oleh karena mengenai ini didorong melalui instrumen yang sifatnya *otoritatif* dan *koersif*.

Politik memiliki bermacam makna yang sesuai dengan kegiatan suatu pemerintahan atau negara dan menghubungkan dengan menetapkan suatu sistem tujuan dan diikuti oleh pelaksanaan dari tujuan tersebut. Politik menurut Aristoteles ialah mewujudkan kehidupan yang baik atau sejahtera secara bersama-sama bukan bersifat pribadi. Politik juga tidak terlepas yang namanya kekuasaan, apa bilah berbicara tentang politik pasti ada maksud dan tujuan di dalamnya melainkan kepentingan sekelompok orang.¹⁴

Membahas ilmu politik berarti membahas tentang negara, sistem pemerintahan, dan juga warga negara yang saling berkaitan dalam setiap prosesnya. Ilmu politik dapat dibidang sebagai ilmu yang sudah cukup tua. Pendapat ini ada pada pengertian umum ataupun dalam pengertiannya yang begitu luas. Apalagi dalam tatarannya dalam menggapai kekuasaan antara individu satu dengan yang lainnya biasanya sering terjadi.

Tak salah jika manusia sepanjang hidupnya ini disebut sebagai “*zon politicon*” atau makhluk politik. Disebut demikian karena selalu ada relasi kuasa dalam hubungan antara manusia, pada zaman kuno yang tandai dengan perang antara suku, dominisasi pemimpinan pada suku atau suku, sampai menciptakan

¹⁴*Ibid*, h. 31

suatu himpunan yang lebih modren hingga saat ini model kekuasaan juga menunjukkan suatu perkembangan yang terus berubah.

Moral politik erat kaitannya dengan sikap, nilai, maupun etika yang pada hakikatnya dimiliki oleh manusia. Kemudian atas dasar tersebut lah yang memberikan kekuatan bahwa etika politik senantiasa didasarkan pada manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya. Etika politik memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.

Merujuk pada hal di atas dalam bentuk realitasnya kehidupan dunia perpolitikan secara umum yang terjadi sekarang, justru banyak para elit politik yang tidak menyadari atau bahkan telah sadar bahwa sikap atau etikanya dalam berpolitik begitu saling bertentangan pada asas atau Norma etika politik. Sudah terlihat jelas ketika elit politik ingin meraih kekuasaan selalu menggunakan segala cara demi tujuan yang ingin dicapai meskipun cara tersebut bertolak belakang pada konsep etika berpolitik.

Namun yang menjadi perhatian tersendiri adalah dalam persaingan dalam pesta demokrasi yang kemudian para aktor yang berkecimpung dalam politik memiliki tujuan utama yaitu popularitas dan kekuasaan tanpa mengingat janji manis yang pernah mereka ucapkan. Justru perbuatan mereka tersebut merupakan sikap atau tindakan yang telah melanggar etika dalam politik dan dapat dikatakan tidak bermoral.

Bahkan begitu banyak pelanggaran yang diperbuat oleh elite politik dalam menetapkan kebijakan atau keputusan, yang mestinya lebih mengedepankan nilai-

nilai etika dan bentuk keadilan yang menyeluruh pada warga Negara. Semestinya keadilan harus berpatokan pada Pancasila dan UUD 1945 demi terciptanya rakyat berkeadilan serta makmur sebagaimana telah tercantum didalam pembukaan UUD 1945.¹⁵

Al Mawardi berpendapat bahwa manusia memiliki kelemahan dan tidak memiliki kemampuan untuk mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecendrungan alami serta kemampuan, ini yang dapat menjadi dorongan manusia untuk bersatu dan saling membahu untuk membantu.

Berawal dari kebutuhan dan bekerjasama pada akhirnya untuk mendirikan sebuah Negara, yang menjadi menarik adalah gagasan ketatanegaraan ini hubungan antara Ahl al-„Aqdi wa al-Halli atau Ahl al-Ikhtiyar dan imam atau kepala Negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenaitu, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya. Memberikan rasa keamanan kepada mereka dan mengola kepentingan mereka dengan baik.¹⁶

¹⁵ Jubair Situmorang, *Etika Politik* (Bandung: Pustaka Setia 2016), h. 49-50

¹⁶ Nanang Tahqiq, *Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media 2004), h. 9.

B. Partisipasi Politik dan Pemilih pemula

Partisipasi politik pada negara demokrasi adalah penyelenggaraan implementasi kekuasaan negara tertinggi yang absah kepada rakyat (kekuasaan rakyat), yang dijadikan interaksi dalam pesta demokrasi (pemilu).

Partisipasi politik merupakan kegiatan kelompok ataupun seseorang dalam keikutsertaan secara aktif pada kehidupan perpolitikan. Antara lain dalam memilih pemimpin negara dengan secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), mencakup pada tindakan memberikan suaranya pada ikut serta dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota prlemen. mencakup pada tindakan. Sedangkan respon politik menurut penulis adalah seberapa peduli seseorang ataupun kelompok pada orang tersebut dalam menanggapi perpolitikan di negaranya, termasuklah di dalamnya itu terdapat sikap politik.

Pemilih pemula merupakan orang-orang yang berjiwa muda yang pertama kalinya mengikuti pemilu dan memberkan hak suara mereka. Bertujuan dalam mengambil keputusan. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dan juga faktor pendukung pemilih pemula dalam pemilihan umum.

1. Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik merupakan suatu kegiatan pada seseorang ataupun pada sekelompok dalam mengikut serakan dirinya dengan aktif pada dunia berpolitik .¹⁷

Menurut P. Samuel Huntington dan Nelson Joan pemilih pemula dalam [artisipasi politik merupakan suatu wujud nyata partisipasi politik adalah ikut menyumbangkan hak suaranya, ikut andil dalam kampanye, materi, ikut kerja dalam pemilihan umum, segala macam kegiatan da juga tindakan yang mempengaruhi setiap seorang calon. Memilih dan juga mempengaruhiberbagai macam kegiatan.¹⁸

Dalam partisipasi merupakan kegiatan dalam demokrasi dimana warga negara ikut sserta untuk memberikan aspirasi Secara tersirat dalam hal ini partisipasi politik bukan hanya sebuah kegiatan yang dilakukan oleh para elite atau professional di bidang politik melainkan keterlibatan masyarakat awam dalam kegiatan politik yang berimplikasi pada demokrasi. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Beberapa orang beranggapan bahwa partisipasi adalah pokok dari demokrasi yang mana dalam hal itu juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk penentu suatu ketetapan ataupun kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Semua aktivitas yang dibuat seorang warga negara bertujuan untuk mempengaruhi

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar...h.* 183

¹⁸ *Ibid*, h. 367

pilihan orang lain dalam posisi pemerintah ataupun mempengaruhi tindakan yang dibuat oleh pemerintah disebut sebagai partisipasi politik.

Keinginan, pendapat, bahkan keyakinan sekalipun, dan berbagai aktivitasnya merupakan tindakan dari partisipasi politik. Semua itu dilakukan dengan sukarela dapat dikatakan tidak ada pemaksaan dari manapun dan siapapun. Pada prakteknya, ada dua bentuk dalam partisipasi, pertama, bentuk partisipasi konvensional, adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam memengaruhi hasil terakhir dari adanya kebijakan. Yang kedua yaitu non konvensional merupakan masyarakat memengaruhi proses yang dapat membuat berubahnya hasil. Contoh dari non konvensional adalah demokrasi.

Aktivitas pada partisipasi politik meliputi suara hal ini merupakan aktivitas dalam berpartisipasi secara aktif yaitu aktivitas yang berorientasi terhadap proses input dan output politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menjelaskan mengenai spektrum partisipasi politik yang bergerak pada suatu garis spektrum yaitu :¹⁹

1. Partisipasi Otonom atau Mandiri

Jenis partisipasi ini merupakan yang sangat di harapkan oleh warga negara. Pada jenis ini, terlibatnya masyarakat dalam memberi ide mengenai konsep yang berkaitan dengan hal pemerintahan, membuat grub menekankan pada pemerintah, mengikuti dalam pemilihan umum, dan lain sebagainya.

¹⁹ Arya Wiguna, "Human of content", dalam abstrak Vol.20 No.1, 2020, (Yogyakarta :ANRI), h. 2

2.Partisipasi Mobilisasi

Pada jenis partisipasi ini, mengedepankan dukungan warga negara kepada orang-orang yang melaksanakan program, baik itu ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Maksudnya dalam jenis partisipasi ini seseorang maupun kelompok manipulasi dari pihak lain begitu signifikan. Kemauan rakyat dalam dukungannya secara mutlak. Program-program yang dibuat oleh pemerintah dan dibentuk tujuannya oleh pemerintah.

Jenis ini memiliki sifat spektrum dan juga justifikasi, pada konteks ini adanya dua kubu yang saling bertentangan. Intinya adalah bahwa masyarakat lebih cepat bergerak dengan adanya dimobilisasi, namun pada masa sekarang, warga negara lebih aktif jika adanya mobilisasi. Otonomi dapat berbalik dengan drastis dengan menuju mobilisasi.

Pada negara yang menganut sistem demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu kedaulatan bangsa karena kekuatan berada pada warga negara. Implementasinya adalah dengan aktivitas umum dalam menentukan pada masa depan warga negara, dan juga dalam menentukan pemimpin yang berikutnya. Pada proses partisipasi politik ini terdapat beberapa proses, partisipasi juga mempunyai beberapa praktek yang biasanya dibuat oleh warga negara yaitu sebagai berikut :²⁰

²⁰ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, h. 260-261

a. Memberikan Suara Dalam Pemilu (Voting)

memberikan suara pada pemilu merupakan bentuk dari partisipasi politik dimana semua warga negara ikut menyuarakan dalam memilih pemimpin. Diselenggarakan dan juga kegiatan partisipasi yang begitu umum dilakukan. Voting memberikan tekanan tertinggi kepada pemerintah sebab kegiatan ini sebagai penentu kandidat ataupun partai politik yang mana yang akan terpilih dan menjadi pengontrol dalam kebijakan.²¹

b. Kampanye

Menurut Saiful Mujani dalam bukunya yang berjudul *Muslim Demokrat*, kampanye merupakan bentuk partisipasi politik yang mencerminkan ketertarikan warga negara pada politik secara lebih akurat dari pada voting. Pada aktivitas ini masyarakat ikut aktif dalam berpartisipasi tidak ada paksaan sama sekali, masyarakat ikut menyuarakan pendapat dan juga aksinya. Aktivitas ini dapat menimbulkan ketertarikan terhadap orang lain.

Ada banyak pendapat yang mempersepsikan bahwasanya pada masa kampanye merupakan hal yang begitu rancu dengan konflik. Yang sangat memungkinkan terjadi yaitu konflik adu mulut hingga menjadi adu otot. Pada tim kampanye, mereka tidak hanya dituntut untuk adu canti pada visi dan misi program pada kerja calonnya, namun juga harus menunjukkan besarnya massa pendukung pada mereka.

Menurut psikologis, semakin besar pendukung dari massa maka akan semakin besar juga pengaruhnya kepada para calon yang dipilih rakyat. Maka dari

²¹ Saiful Mujani, *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 261

itu, pada kampanye hanya ada pemaparan dan dialog yang dilakukan oleh para calon paasngan, dan jarang sekali terhenti pada realita. Maka,arak dan turun kejalan adalah salah satu dari upaya menunjukkan bhwa besarnya massa untuk mendukung, persepsi seperti itu, tentu tidak lahir dari karya rekaan, namun berdasarkan anlisis storis dan juga logis.²²

c. Aktivitas Kemasyarakatan

Aktivitas ini adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik melalui kerjasama dengan orang lain tentang permasalahan pada sosial da juga politik. Ikut serta warga negara dalam mengorganisasikan terhadap berperan hingga aktif pada sebuah embaga masyarakat. Ini merupakan bentuk dari partisipasi politik

d. Petisi

sudah tidak asing lagi kata petisi ini pada masyarakat Indonesia. Bentuk dari partisipasi ini merupakan salah satu kebijakan publik dengan cara menandatangani untuk penolakan ataupun suatu dukungan. Ini merupakan tindakan pemerintah untuk mengambil keputusan dengan tindakan yang mampu mewakili dari aspirasi rakyat dalam sebuah petisi yang telah diberikan.

²² Mahi M. Hikmat, *Komunikasi Politik*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media,2010)

e. Protes

Bentuk reaksi protes adalah reaksi yang dibuat oleh masyarakat untuk memberikan kritikan kepada pemerintah terlebih pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pada bentuk partisipasi ini menunjukkan tidak setuju atau bahkan untuk menentang pada suatu kebijakan.²³

Dalam realita kehidupan sehari-hari, perilaku merupakan tindakan-tindakan, aktivitas-aktivitas, yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku manusia pada umumnya dimotivasi oleh individu bersangkutan. Perilaku politik dasarnya terbentuk setelah melewati serangkaian aktivitas. Berdasarkan kepentingan pemenuhan kebutuhan, motivasi, kepentingan. Dan perilaku politik merupakan serangkaian aktivitas yang potensial dapat menjelaskan perilaku politik.

2. Pemilih Pemula

Peranan pemilih pemula sangatlah penting karena sebanyak 20 % karena jumlah pemilih pemula begitu besar, sehingga sangat diharapkan hak pilihnya dalam memilih. Antusias pemilih pemula sangatlah tinggi dan juga keputusan mereka belum tentu atau dapat dibilang masih ragu, pilihan politik mereka belum dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan politik dan juga ideologis tertentu, mereka lebih didorong oleh dinamika lingkungan, keluarga, kerabat, dan juga media massa juga ikut berperan untuk mempengaruhi terhadap pemilihan oleh pemilih pemula.

²³ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat : Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, h. 263.

Pemilih pemula merupakan warga Indonesia yang sudah genap berusia 17 sampai 21 tahun, dan awal pertama kali mengikuti hak pilih dalam pemilihan umum. Pemilih pemula identik belum mempunyai pengalaman dalam memilih, pemilih pemula penting untuk mengetahui dan juga memahami berbagai hal tentang pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, siapa saja yang boleh ikut pemilu, bagaimana cara menggunakan hak pilih, dan sebagainya.

Pemilih pemula adalah warga yang telah di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar sebagai pemilih, dan baru memberikan suara dengan rantang usia 17 sampai 1 tahun. Kelompok pemilih pemula biasanya mereka yang sedang berstatus, pelajar, mahasiswa, bahkan pekerja muda, Mereka yang masih membutuhkan pembinaan dan bimbingan dalam mengarahkan pertumbuhan potensi dan juga kemampuannya pada tingkat yang optimal agar bisa berperan didalam dunia politik.

Menurut M. Rusli Karim kaum muda merupakan yang sulit di dikte, generasi muda adalah kelompok muda yang sulit di terka oleh kontestan pemilu maupun partai. Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Kaum muda memiliki antusias yang sangat tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menetapkan pemilih pemula sebagai *swing voters* yang sesungguhnya.²⁴

²⁴ Sastroadmojo Sudijno, *Partisipasi Politik*, (Semarang:IKIP Semarang Press, 1995), h.85

C. Tujuan Partisipasi Politik

Partisipasi politik bertujuan untuk memengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam pemerintah. terorganisasi ataupun juga dengan spontan, individual ataupun kolektif, damai ataupun dengan cara kekerasan, illegal ataupun legal. Partisipasi politik adalah aspek penting dalam demokrasi karena keputusan yang diambil oleh pemerintah akan memengaruhi dan juga menyangkut pada kehidupan masyarakat yang berhak ikut dan juga menyertakan menentukan isi keputusan tersebut.

Menurut Gabriel A. Almond dan G.Bingham Powell, Jr. terdapat 3 komponen yang menggambarkan sejauh mana orientasi seseorang terhadap partisipasi politik. Ketiga komponen obyek politik tersebut adalah:

1. Orientasi Kognitif

Penjelasan pada orientasi kognitif ini adalah tentang hal pengetahuan dan juga peranan, segala kewajiban, output hingga inputnya, dalam kepercayaan pada sistem politik. Contohnya kebijakan yang diambil, tentang pengetahuan pada politik, hingga tokoh pemerintahan dan juga simbol-simbol pada kenegaraan.

2. Orientasi Afektif

Berbeda dengan kognitif, orientasi afektif ini lebih terpacu untuk perasaan terhadap sesuatu sistem pada politik. Yang mencakup terhadap tokoh, penampilan, dan peranan. Dapat dibayangkan bahwa orientasi ini lebih mengkedepannya dengan perasaan kepada sistem politik.

3. Orientasi Evaluatif

Bentuk partisipasi politik ini adalah berhubungan pada pendapat dan juga objek-objek politik dengan melibatkan kriteria dan juga standar nilai bersumberkan pada informasi dan prasaan. Orientasi ini adalah sebuah penilaian seseorang kepada sistem politik dengan merujuk terhadap pertimbangan politik kepada suatu sistem politik.

Partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum adalah salah satu contoh partisipasi politik di Indonesia yang mengkedepankan nilai kebebasan, masyarakat diberi kebebasan penuh dalam memilih dan juga mendukung calon pemimpin.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dinyatakan bahwa pemilihan umum merupakan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, bebas, dan adil.

D. Model Perilaku Pemilih

Pada perilaku dalam hidup ini sering sekali disebut dengan istilah tingkah laku, secara biologis, perilaku artinya aktivitas *organisme* yang memiliki bentangan yang luas. Menurut Soekidjo, perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat di amati maupun yang tidak dapat diamati langsung.²⁵

²⁵ Soekidjo Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 133

Menurut Notoadmojo perilaku manusia itu muncul karna untuk merespon atau sebagai reaksi terhadap rangsangan atau stimulus. Stimulus berasal dari dirinya sendiri atau dari luar (lingkungan). Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional, perilaku merupakan tanggapan ataupun reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.²⁶

Sebelum membahas perilaku politik, terlebih dahulu akan membahas orientasi politik. Menurut Almond dan Verba, oriensi kepada pemilih merupakan perilaku masyarakat dengan sistem politik termasuk aneka ragam bentuknya, dan perilaku terhadap peran di pribadi didalam sistem tersebut. Pada pandangan ini, dapat dipahami setiap masyarakat, pemerintah, di anggap mempunyai pengaruh dalam mengambil keputusan di dalam sistem yang bersangkutan. Maksudnya adalah individu yang mempunyai kursi atau dapat disebut senagai pemimpin harus mempunyai orientasi politik yang tidak jauh beda dengan orang yang lainnya. Sebab mereka juga berasal dari tlingkungan itu dan juga melewati proses sosialisasi politik yang sama. Perbedaanya pada masyarakat biasa ialah mereka cenderung menerima nilai-nilai demokrasi dengan perilaku yang positif.²⁷

Dalam mempengaruhi pada sikap politik seseorang dan pemimpin ada beberapa faktor yang timbul dalam perilaku politik. Yang pertama. Struktur kepribadian yang ada pada pada setiap individu, kedua, lingkungan sosial yang tidak langsung seperti terpengaruh oleh yang lainnya, ketiga, lingkungan sosial yang langsung mempengaruhi. Pada sikap pemilih ada tiga model pendekatan yang dapat menjelaskan sejauh mana pada ketiga model tersebut dpat

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta:Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah,2005),h.25

²⁷ Mahi M.Hikmat, *Komunikasi Politik*, (Bandung : Simbiosarekatama Media, 2010), h. 147

mempengaruhi ataupun iku berperan pada pilihan individu pemilih. Ketiga model itu ialah model sosiologis, model psikologis, dan juga model pilihan rasional atau ekonomi politik.

1. Model Sosiologis

Pada model ini, dominan dengan adanya kelas sosial, agama, kedaerahan atau bahasa, dan juga kelompok etnik. Individu yang sosiologis berkeyakinan pada masyarakat pemilih memilih calon pejabat public ataupun partai sebab mempunyai kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik sosiologis partai ataupun calon .²⁸

Yang melatar belakangi pada model ini adalah membuat orang ikut memilih dikarekan kelas sosial, agama, ras, dan yang lain sebagainya sehingga pilihan responden ini berjalan dengan adanya hubungan yang terdapat pada calon ataupun histori dari yang lainnya.

2. Model Psikologis

Berbeda dengan sosiologis, pada model ini adalah perpaduan dengan aktivitas masyarakat dan juga tingkah laku yang dipengaruhi adanya seseorang. Pada ilmu psikologis itu snediri menjelaskan tentang sifat, dan juga fikiran manusia. Pada model ini model psikologis dan politik menjadi bersatu dengan melibatkan masyarakat dan juga sikap yang ada pada psikologi.

Dalam psikologi, kedekatan yang terjadi dengan emosional terhadap tokoh ataupun partai saling berkaitan dan dapat menjadi penilaian dari setiap individu.

²⁸ Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru...*, h. 9-10.

Dan dapat berpengaruh menguntungkan atau tidaknya dalam mengikuti sertakan seseorang dapat dilihat dengan kebijakan, isu yang beredar, dan juga opini pada pribadi masing – masing.

3. Pilihan Rasional

Pendekatan ini muncul dan berkembang sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan.²⁹

Pada model ini masyarakat lebih mengkedepannya sifat rasionalnya. Yang menurutnya dapat membantu dan mendukung pada perekonomian adanya nya. Mengutamakan keuntungan yang di dapatkan ketika individu memilih calon pemimpin. Ikut partisipasi dikarenakan adanya sogokan. Maka dari itu, masyarakat telah terbiasa dengan hal yang menjanjikan di awal. Suara yang dibeliberlandaskan pada perekonomian dimana dapat menguntungkan baginya. Begitu menonjolkan pluralitas pada berpandangan. Intinya calon pemimpin bermodalkan dengan seminim- mininya untuk mendapatkan keuntungan nantinya yang sebanyak-banyaknya.

²⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar...* h. 92

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kelurahan Pekan Besitang

Geografis merupakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan bumi ataupun lokasi atau yang berkaitan dengan suatu tempat lain dan juga sekitarnya. Pada penjelasan berikut ini yang dimaksudkan oleh peneliti merupakan Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 710,48 km², jumlah penduduk 7.906 (tujuh ribu Sembilan ratus enam) jiwa dengan kepadatan 90 jiwa/km². Sebahagian besar dari penduduk Kelurahan Pekan Besitang Mayoritas bersuku Batak 5 %, Suku Jawa 10%, Suku Aceh 15%. Dan Terbanyak adalah suku Melayu 60%.dan lain sebagainya.

Besitang adalah kedatukan dengan kepemimpinan dibawah kekuasaan kesultanan tanjung pura langkat. Datuk pertama, pusat pemerintahan dahulu di kampung Lama, disitulah terdapat istana kedatukan Besitang namun sekarang telah hancur dan tidak ada sisa-sisanya lagi. Di sebelah istana kedatukan terdapat masjid Datuk Besitang yang telah berdiri beratus tahun tapi sayangnya keaslian dari bangunan itu sudah diganti dengan masjid yang baru sehingga sudah tidakada lagi terlihat yang asli. Terdapat pula peninggalan makan pahlawan Indonesia yang berjuang pada tahun 45 yang memerangi tentara penjajh, sehingga dia gugur

dalam peperangan itu. Di kampong lama ada juga peninggalan jaman dulu yaitu rumah tinggi kediaman datuk Nordin gelar Datuk seta Bakti.³⁰

Besitang mempunyai adanya hasil alam seperti kelapa sawit, karet, jeruk, da lain sebagainya. Juga terdapat hasil laut yang begitu banyak termasuk ada juga tambak udang untuk mencari nafkah pada penduduk Besitang. Pabrik juga ada seperti pabrik RGM/ Raja Garuda Emas, dan berganti nama menjadi AFR/ Asia Forestama Raya (dalam keadaam tidak beroperasi) yang mengolah kayu menjadi polywood, dan juga pabrik kelapa sawit. Penduduk Kelurahan Pekan Besitang mayoritas bermata

pencaharian sebagai petani kelapa sawit.

Tabel I

Batas Wilayah Kelurahan Pekan Besitang Sebagai Berikut :

Letak Daerah	Berbatasan Dengan
Utara	Desa Bukit Selamat
Barat	Desa Bukit Selamat
Selatan	Kelurahan Bukit Kubu
Timur	Kelurahan Bukit Kubu

Jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Pekan Besitang 7.906 (tujuh ribu Sembilan ratus enam) jiwa dengan kepadatan 90 jiwa/km². Selisih sedikit dengan banyaknya jumlah lelaki daripada perempuan. Kode pos Kelurahan Pekan Besitang 20858. Dengan kode wilayah Administrasi 12.05.16.1009.

³⁰ Id.m.wikipedia.org di unduh pada 01 Agustus 2020

Wilayah di kelurahan terbagi pada beberapa lingkungan, kepala lingkungan (kepling) dipilih dengan hak suara dan dipilih langsung oleh warga dengan menyertai beberapa calon yang juga dibuat oleh warga setiap lingkungan.

Tabel II

Dikelurahan Pekan Besitang Terdapat Beberapa Lingkungan Yaitu :

No	Lingkungan	Kepala Lingkungan
1	Kp. Lalang I	Suprpto
2	Kp. Lalang II	Mhd Khaidir
3	Muara Soma	Samsul Bahri
4	Simpang Lima	Sukardi
5	Sungai Pucuk	Ir. Zakirudin
6	Sungai Pucuk II	Rahiman
7	Bukit Kubu I	Abdul Hamid Sinulingga
8	Bukit Kubu I	Muhammad Din
9	Bukit Kubu III	Muhammad Satta
10	Kampung Tengah	Teguh Waluyo
11	Kampung Baru	Safrizal

Pada Kelurahan Pekan Besitang ini, jumlah lelaki 3.969 jiwa dan jumlah perempuan 3.937 jiwa.

Tabel III

Penduduk Kelurahan Pekan Besitang sebagai berikut :

Jenis	Jumlah
Kepala Rumah Tangga	1.769 jiwa
Kartu Keluarga	2.067 Keluarga
Laki – laki	3.969 jiwa
Perempuan	3.937 jiwa

B. Keadaan Demografis Kelurahan Pekan Besitang

Demografis merupakan pengetahuan yang bersangkutan dengan latar belakang mengenai jumlah penduduk dan juga pertumbuhan penduduk pada wilayah ataupun Negara. Maka dari itu, demografis dapat juga dikatakan bahwa sketsa mengenai kependudukan, yang ada sangkut pautya dengan agama, pendidikan, dan yang lainnya yang ada di Kelurahan Pekan Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan data kependudukan, penduduk Kelurahan Pekan Besitang di perkirakan telah mencapai 7.906 jiwa, jumlah tersebut dengan jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Jumlah tersebut adalah penduduk tetap, sedangkan pada penduduk tidak tetap, di perkirakan lebih dari 250 jiwa, yang merupakan penduduk yang tidak tetap.³¹

³¹ Sumber data oleh Staff Kelurahan Pekan Besitang, Wawancara. Pada 5 Agustus 2020

Sebagian besar penduduk Kelurahan Pekan Besitang merupakan beragama Islam. Namun dari jumlah banyaknya penduduk Kelurahan Besitang, Kelurahan Pekan Besitang memiliki beragam agama yakni :

Tabel IV

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Persen
1	Islam	80.66 %
2	Kristen Protestan	9.95 %
4	Budha	0.19 %
5	Hindu	0.04%
6	Konghucu	0.04%

Berdasarkan data BPS kota Langkat tahun 2019, mayoritas penduduk di Besitang lebih banyak menganut agama Islam seperti tabel di atas, selain beragam suku juga beragam agama.

- a. Islam: terutama dipeluk oleh suku Melayu, Pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Mandailing, Angkola, sebagian Karo, Simalungun dan Pakpak
- b. Kristen: terutama dipeluk oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias dan sebagian Batak Angkola
- c. Hindu: terutama dipeluk suku Tamil India
- d. Budha: terutama dipeluk oleh suku peranakan Tionghoa
- e. Konghucu: terutama dipeluk oleh suku peranakan Tionghoa

C. Pemilihan Presiden 2019

Berbeda pada pemilu yang sebelumnya, pemilu pada tahun 2019 ini dilakukan dengan serentak yaitu pada pemilihan anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu serentak ini baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Ini akan menjadi sejarah pemilu di Indonesia. Kerangka pemilu juga berbeda dibandingkan pada pemilu yang sebelumnya, yang terpisah-pisah menjadi tiga undang-undang, namun pada kali ini menjadi satu di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemilu berkembang menjadi ilmu yang sangat esensial pada sistem politik hampir pada di setiap negara. Pemilihan umum atau sering disebut sebagai pemilu menjadi peristiwa yang mempresentasikan penegakan dalam demokrasi. Dengan terselenggaranya pemilu, dunia luar menjadi mengetahui bahwa rakyat telah ikut serta dalam menentukan siapa yang berhak memerintah. Oleh sebab itu, pemilu pada perkembangannya tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme penyangga pada demokrasi (bagi negara yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemilu), dan instrument pembenar bagi suatu pemerintahan (bagi negara yang kurang demokratis), namun juga telah menjadi semacam “ritus” politik yang berlaku universal.³²

Pemilihan umum nasional pertama setelah merdeka baru dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 setelah melalui proses yang demikian panjang dan juga melelahkan. Kampanye pemilu dilaksanakan pada bulan pertama 1954. Sedangkan pendaftaran pemilihan dimulai pada bulan Mei 1954 dan selesai pada

³² Katimin. Politik Islam Indonesia, (Medan: Perdana Publishing, 2018) h. 96

bulan November 1954, dengan mencatat 43.104.464 orang yang mempunyai hak pilih.

Pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 menggunakan dasar hukum yang baru yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2017 Mengenai Pemilu. Pada rancangan Undang-Undang ini dipersetujui oleh rapat Paripurna DPR RI juli 2017 lalu di sahkan oleh Presiden joko Widodo pada 15 Agustus 2017. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang begitu terlihat merupakan adanya perbedaan pada pembagian tugas, status, dan juga wewenang KPU dan juga Bawaslu. Wewenang dan tugas KPU berkurang, dan tugas serta wewenang Bawaslu peningkatan. Tugas dan wewenang bawaslu dalam penyelesaian sengketa dalam tahapan (sengketa dalam proses) pemilu mengalami penguatan.³³

Pemilu dilakukan dengan serentak, sebab dilakukan secara serentak baik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, maka tahapan penyelenggaraan pemilu juga mencakup berbagai pemilohan tersebut. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerpkan tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi :³⁴

- a. Perencanaan program dan anggrana serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
- b. Pemuktahiran data pemilh dan penyusun daftar pemilih

³³ Topo Santoso dan Ida Budhiati , *Pemilu Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), h.272
- 273

³⁴ Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017.

- c. Verifikasi dan pendaftaran peserta pemilu
- d. Penetapan peserta pemilu
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- f. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
- g. Masa kampanye Pemilu

Meskipun begitu, semua berjalan tidak lancar, pada kenyataannya berbagai kekurangan, dan kurang sinkronnya, kekosongan hukum, duplikasi, dan lain sebagainya masih saja terjadi. Hal-hal tersebut akan makin terlihat pada undang – undang ini. Kerangka pada pemilu ini selalu mendapatkan masalah baru yang serupa kurang konsisten, kurang lengkap, kekosongan hukum, dan lain sebagainya. Pengamat pemilu juga beranggapan seperti itu.

D. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara

Komisi Pemilihan Umum pada masa sekarang adalah telah menjadi yang keempat sejak dari masa reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan kepres no 16 tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. KPU pertama dilantik presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan keppres no 10 tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdulrahman Wahid pada tanggal 11 Agustus 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 Yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsul Bahri yang urung dilantik

Presiden karena masalah hukum. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- a. Mengkonsep dan juga melaksanakan segala persiapan pemilu.
- b. Sebagai menelaah, mengesahkan, dan juga menerima pada partai apa saja yang boleh untuk pemilu.
- c. Membentuk Panitia Pemilih Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai ditempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS.
- d. Menetapkan jumlah kursi DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: I Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kelurahan Pekan Besitang

Pada bagian penelitian ini peneliti memaparkan mengenai partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan Presiden atau sering dikatakan dengan pilpres yang telah dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilihan Presiden telah dilakukan di Indonesia sebanyak 5 kali setelah pada masa Orde Baru berakhir yakni pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada pemilihan Presiden 2019 lalu, terdapat dua calon Presiden dan juga Wakil Presiden. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pertama adalah Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang kedua adalah Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti merupakan ikut sertanya masyarakat dalam berpartisipasi untuk menentukan keputusan yang bersangkutan mempengaruhi hidupnya. Berpartisipasi politik berarti masyarakat ikut beraktivitas dari masyarakat kalangan biasa maupun masyarakat menengah ke atas menyuarakan aksinya dalam partisipasi politik. Dari pendapat beliau dapat diambil kesimpulan yaitu ikut sertanya masyarakat biasa untuk menetapkan rancangan perjalanan politik, dengan mengikutsertakan dalam kehidupan dirinya dalam berpartisipasi.

Tetapi pada pembahasan pada penelitian kali ini yaitu partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan Presiden Tahun 2019 yang mana masyarakat pemilih pemula adalah Pemuda pemudi di Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dapat diketahui bahwa pengertian pemilih pemula adalah

masyarakat yang telah mendapatkan undangan pemilihan dan telah cukup umurnya merupakan masyarakat yang berusia 17 tahun mau itu sudah menikah, pelajar, dan mahasiswa yang pada awalnya mereka belum pernah ikut memilih dan menjadi termasuk pemilih sebab ketentuan Undang-Undang pemilihan Umum.

Tepat di tanggal 1 Agustus 2020 peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Pekan Besitang. Peneliti melakukan wawancara dengan 10 orang pemilih pemula yang ada di Kelurahan Pekan Besitang. Agar peneliti mendapatkan hasil dari penelitian ini. Adapun hasil dari penyebaran angket pemuda di kelurahan Pekan Besitang adalah sebagai berikut:

Tabel. V

Usia yang sudah mencapai 17 tahun Kelurahan Pekan Besitang :

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Iya	274	83 %
2	Tidak	51	13%
Jumlah		325	100 %

Pada tabel tersebut menjelaskan yaitu ada 274 pada pemuda pemudi di kelurahan pekan Besitang yang sudah berusia 17 tahun keatas yang sudah berhak ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2019. Begitupula sebaliknya pada tabel di atas terdapat 51 orang di kelurahan pekan Besitang yang belum genap 17 tahun pada saat jatuh waktu pemilihan presiden 2019.

Dengan adanya info yang dapat saya informasikan dari informan dari pemuda di kelurahan pekan Besitang, pada mulanya peneliti memberi pertanyaan

yaitu bagaimana tanggapan informan tentang pilpres tahun 2019. Dan ia menjawab yakni: “Saya tidak dapat mengikuti dalam pemilihan presiden 2019 karena saya belum mencapai usia 17 tahun. Sebab saya lahir pada tanggal 11 Juni 2002. Itu sebabnya saya tidak tercatat sebagai pemilih³⁵.

Tabel. VI

Tanggapan kepemilikan KTP

Pemilih Pemula di Kelurahan Pekan Besitang :

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Sudah	195	69 %
2	Belum	130	41 %
		325	100 %

Dari tabel ini maka di ambil kesimpulan yaitu, hasil yang didapat adalah terdapat 325 dari pemilih Pemula di Kelurahan Pekan Besitang. Ada 195 jiwa yang telah genap usianya dan dapat mengikuti pemilihan Presiden pada tahun 2019.

Dengan apa yang ditetapkan UU No 7 Tahun 2017 mengenai syarat-syarat yang harus ada pada setiap orang yang ikut memilih, yaitu berumur 17 tahun ke atas. Pada penjelasan tersebut begitu jelas dalam kriteria berumur 17 tahun pemuda dan pemudi di Kelurahan Pekan Besitang memang harus ikut memilih sebab mereka mempunyai tanggung jawab karna telah berusia yang berusia 17

³⁵ Ahmad Rifai, Pemuda di Kelurahan Pekan Besitang, Wawancara Pribadi, Pada tanggal 14 Agustus 2020

tahun. Namun pada keterbalikan yang ada pada tabel ada 130 pemuda pemudi di kelurahan Pekan Besitang yang belum genap berumur 17 tahun pada saat pemilihan Presiden pada tahun 2019 .

Tabel. VI Tanggapan Kepemilikan KTP Pemilih Pemula Kelurahan Pekan Besitang dapat disimpulkan bahwa, 195 orang yang telah mempunyai kartu tanda penduduk, tapi dengan adanya kepemilikan KTP dari 130 pemuda pemudi ini tidak memberikan suaranya memilih Presiden Tahun 2019. Mereka beranggapan bahwa KTP tidak begitu penting dan tidak ada pengaruhnya dalam pemilihan Presiden Tahun 2019, mereka mempunyai alasan bahwa KTP itu Cuma sebagai identitas pada penduduk. Dan mereka tidak tahu bahwa Ktp merupakan syarat untuk ikut serta dalam pencoblosan.

Tabel VII

Mengenai Belum Pernah ikut dalam Pemilihan Umum

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Sudah	15 orang	7 %
2	Belum	310 orang	93 %
Jumlah		325 orang	100 %

Pada tabel ini menjelaskan yaitu, hasil dari pernyataan dari 325 orang Ada 310 orang-orang yang samasekali belum terdaftar untuk memilih sebab mereka tidak terdaftar menjadi pemilih, karena umur mereka belum mencapai tahun pada masa pemilihan Presiden. Sebagaimana yang dapat peneliti sampaikan dari informan, dengan memberikan pertanyaan untuk informan yaitu apa faktor yang

mempengaruhi informan tidak ikut dalam Pemilihan Presiden. yakni dengan jawaban :“Saya tidak pernah ikut dalam pemilihan dikarenakan umur saya tidak mencapai 17 tahun masa itu”, dan ada juga yang memberi jawaban “Saya tidak ikut dalam pemilihan sebab saya tidak mendapatkan surat keterangan untuk memilih”, Kemudian ada juga yang menyatakan “ Saya tidak memilih sebab belum ada KTP tapi umur saya telah mencukupi”.³⁶

Termasuk penulis sendiri merupakan salah satu pemilih pemula di kelurahan pekan Besitang, pada pemilihan Presiden 2014 penulis belum dinyatakan sebagai pemilih karena belum mencapai usia 17 tahun, penulis lahir pada 23 Agustus 1998 pada masa itu penulis masih berusia 16 tahun. Dari 325 orang ada 15 pemuda pemudi telah mempunyai pengalaman dalam memilih sebab mereka telah genap usia nya 17 tahun dan telah menjadi pemilih tetap.

Tabel VIII

Mengenai Keikutsertaan Pemilihan Presiden Tahun 2019 :

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Memilih	87 Orang	32 %
2	Tidak Memilih	238 Orang	68%
Jumlah		325 Orang	100%

Tanggapan pemuda dan pemudi mengenai Keikutsertaan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, Ada 238 orang tidak

³⁶ Sabita Magrifah, Pemudi Kelurahan Pekan Besitang, Waancara Pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

ikut serta dan tidak memberikan suaranya sebab mempunyai alasan tersendiri. Peneliti memberikan pertanyaan terhadap responden yaitu bagaimana pengetahuan responden mengenai Pemilihan Presiden diantaranya :“ Saya tidak mengetahui sistem pemilihan, karena saya baru pertama kali ikut terdaftar dalam pemilihan Presiden tahun 2019. Itulah alasan saya mengapa saya tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden tahun 2019”. Tanggapan oleh pemuda yang ada di Kelurahan Pekan Besitang.

Kemudian alasan diatas juga di perkuat oleh seorang sebagai berikut, yakni:“ Saya tidak ikut memilih membuat saya malas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Presiden tahun 2019 ini. Alasan di atas hampir serupa dengan disampaikan pemuda dan pemudi di atas, namun ada perbedaan, yakni:“ Saya gak pernah tau kapan waktu memilih, sehingga tiba dihari pemilihan umum membuat saya malas untuk memilih, karena tidak ada yang mengarahkan saya untuk ikut serta dalam pemilihan Presiden ini, sementara rasa penasaran untuk ikut memilih itu ada, apalagi saya baru pertama ingin memilih, tapi begitulah dorongan untuk memilih itu tidak ada buat saya.”³⁷

Dari 325 orang pemuda pemudi Kelurahan Pekan Besitang, Ada 87 orang yang ikut memilih. Alasan mereka ikut memilih yang peneliti dapat dari informan, dengan memberikan pertanyaan yaitu bagaimana pengetahuan informan tentang pemilihan Presiden “ Saya ikut memilih karena saya sudah berusia 17 tahun dan sudah mendapatkan kartu tanda pemilih surat keterangan untuk memilih”.³⁸

Kemudian ada yang menyatakan “Saya ikut memilih karena kesadaran saya

³⁷ Muhammad Habib Baihaqi, Pemuda Kelurahan Pekan Besitang, Wawancara Pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

³⁸ Andi Syahputra, Pemuda Kelurahan Pekan Besitang, Wawancara Pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

sendiri, karena itu merupakan salah satu hak yang harus saya penuhi di usia 17 tahun ini untuk berpartisipasi dalam pemilihan”. “Saya merasa rugi kalau saya tidak memilih karena ini merupakan pemilihan pertama yang saya lakukan, dan saya rasa saya sudah wajib untuk memilih di usia saya yang sudah genap di 17 tahun ini”.³⁹

Tabel. XI

**Tanggapan pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang Informasi
Mengenai Pemilihan Presiden Tahun 2019**

No	Tanggapan	Jumlah
1	Media Massa	69 Orang
2	Dari Sekolah	-
3	Dari KPU	-
4	Keluarga	53 Orang

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa, hasil dari pernyataan Pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang, Ada 69 orang yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai pemilihan Presiden tahun 2019 melalui media massa. Kemudian pemilih pemula Kelurahan Pekan Besitang hanya 53 orang yang mendapatkan informasi mengenai pemilihan Presiden tahun 2019. Jelas bahwa peran keluarga didalam memberi informasi bahkan ajakan untuk memilih dalam pemilihan Presiden ini sngtlh minim.

³⁹ Eva Santi, pemudi Kelurahan Pekan Besitang, Wawancara Pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

Media yang sering digunakan oleh dunia politik adalah pers. Pers adalah lembaga sosial (*social institution*) atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara dimana ia beroperasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya.⁴⁰

Tabel. X

**Tanggapan Pemilih Pemula Kelurahan Pekan Besitang Sosialisasi KPU
Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019**

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Ada	-	-
2	Tidak Ada	325 Orang	100 %
Jumlah		325 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, hasil dari pernyataan orang pemilih pemula kelurahan Pekan Besitang, Ada 325 orang yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dalam pemilihan Presiden tahun 2019, itu alasan yang membuat pemilih pemula untuk tidak ikut serta dalam memberikan hak suaranya pada saat hari pemilihan, dan mereka beranggapan bahwa memberikan hak suara dan ikut berpartisipasi dalam hal pemilihan itu tidak begitu penting. adanya sanggahan para pemilih pemula yang menyatakan bahwa minimnya informasi dalam hal tata cara pemilihan umum, itulah sebab yang membuat mereka tidak ikut serta dan menggunakan hak pilihnya.

⁴⁰ Junaidi, *Diaspora Etnis Jawa Perilaku Komunikasi dan Pilihan Politik*(Yogyakarta; Bildung, 2020), h. 51

B. Perilaku Pemilih Pemula dalam pilpres tahun 2019 di Kelurahan Pekan

Besitang

Perilaku bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri melainkan dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan juga internal yang berasal dari pada lingkungan sekitar. Faktor-faktor tersebut dapat berupa alam, kebudayaan pada masyarakat setempat, tempat pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Perilaku politik dalam dbilang sebagai kegiatan yang berkenaan pada proses pelaksanaan dan pembuatan dalam keputusan politik.⁴¹

Sikap merupakan tindakan seseorang, kesiapan mental dan juga syaraf dari kesiapan, yang di atur dari pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan padanya.⁴²

Sedangkan Jalaludin Rakhmat mengemukakan lima pengertian sikap yaitu yang pertama, sikap merupak kecenderungan pada bertindak, berpersepsi, ide, situasi, berfikir, dan merasa dalam menghadapi. yang kedua, sikap mempunyai daya tolong ataupun motivasi yang ketiga sikap lebih menetap. Yang keempat, sikap mengandung evaluative, artinya mengandung nilai menyenangkan dan tidak menyenangkan. Lima, sikap timbul dari pengalaman, artinya tidak dibawa dari lahir, tapi dari hasil belajar.maka dari itu sikap dapat di ubah. Tipe-tipe perilaku politik seperti apatisme, sisnisme, anomi, dan alienasi.⁴³

⁴¹ Sujino Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang:IKIP Semarang Press,1955) h. 2

⁴² G.W Alport dalam Tri Rusmi Widayatun,1999, h. 218

⁴³ Rafael Raga Maran, h. 155

Apatisme merupakan sikap yang dimiliki oleh orang yang tidak minat atau tidak punya perhatian kepada orang lain. Orang yang apatis adalah orang yang pasif, yang hanya mengandalkan perasaan pada saat menghadapi masalah. Ia tidak mampu menyelesaikan pada masalahnya, tidak menyelesaikan tanggung jawabnya baik peribadi maupun kemasyarakatan.

Sinisme merupakan sikap yang dimiliki oleh orang yang menghayati tindakan dan juga motif orang lain dengan prasaan yang curiga. Orang yang bersikap sinis lebih realis dari pada optimistis. Orang yang sinis mempunyai tanggapan bahwa politik adalah urusan yang kototr, politisi tidak dapat di percaya, individu yang menjadi korban pada setiap kelompok, kekuasaan yang dijalankan oleh orang yang bertanggung jawab.

Anomi adalah prasaan kehilangan arah hidup dan juga nilai, sehingga ia tidak termotivasi pada pengambilan tindakan-tindakan yang berarti pada hidup. Orang yang anomi beranggapan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli terhadap tujuan – tujuan hidupnya.

Alienasi menurut Robert Lane merupakan prasaan keterasingan seseorang pada kehidupan perpolitikan dan pemerintah masyarakat. Orang yang tipe ini cenderung pada melihat peraturan-peraturan yang dibuat tidak adil dan hanya menguntungkan pada penguasa.

Menurut M. Rusli Karim kaum muda merupakan kaum yang begitu sulit dipahami bahkan ada dugaan bahwa kaum muda merupakan kelompok yang sangat sulit dipahami dan didekati oleh kaum partai politik. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusia yang tinggi namun mereka dapat merubah

pilihannya yang belum bulat dapat menempatkan perilaku mereka disebut *swing voters* yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi oleh motivasi ideologis tertentu dan lebih di dorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Ketidaktahuan dalam sosial politik praktis, terlebih lagi dengan pilihan dalam pemilu, membuat pemilih pemula tidak berfikir rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.⁴⁴

Kebanyakan dari pemilih pemula lebih mengutamakan pengetahuan yang ia dapatkan dari lingkungan daripada pengetahuan mengenai pemilu atau politik dari cara mencari tahu sendiri, sebagai contoh bagaimana mereka menentukan pilihan politik dalam sebuah partisipasinya di pemilihan umum.

Tingkah laku dan aktivitas pemilih pemula sangat dipengaruhi oleh individu dalam hal ini masuk kedalam konteks psikologi bergabung dengan ilmu politik yang mempelajari aspek tingkah laku masyarakat yang mempunyai keterkaitan yang dekat dengan psikologi. Konteks ini merujuk pada persepsi pemilih pada partai-partai maupun ketertarikan emosional terhadap suatu partai tertentu.

Aspek ranah ekonomi juga dapat dibilang sebagai pilihan politik pemilih pemula diman lebih mengedepankan bagaimana pemilih mendapatkan keuntungan dari berpartisipasi atau menyuarakan hak pilihnya. Dalam pilihan rasional pemilih lebih cenderung dengan apa yang akan didapatkan saat itu juga dari memilih seorang kandidat. Pemilih pemula ini cenderung mempengaruhi pemilih pemula berdasarkan figure atau popularitasnya bukan kepada kemampuannya. Maka dari

⁴⁴ <http://muhammadzikra15blogspot.co.id> (03 Agustus 2020)

itu pemilih pemula di anggap sebagai sumber atau penghasilan suara yang cukup signifikan karena mereka mudah (pemilih pemula).

Asumsi-asumsi menjelaskan bahwa perilaku dalam berkomunikasi manusia sangat terkait dengan nuansa ekonomis yaitu menghindari kerugian dan mencari keuntungan, pandangan seperti ini tentu tidak dherankan lagi sebab pada awalnya memang digunakan untuk fenomena politik melalui teknik-teknik analisa ekonomi, yang dalam disiplin ilmu ekonomi biasa digunakan untuk menganalisa perilaku produsen dan konsumen.⁴⁵

Pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang dalam pemilihan umum menjadi salah satu bentuk partisipasi politik sebagai kedaulatan rakyat, sebab pada pemilu itulah, pemilih pemula menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Pemilih pemula merupakan warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu, mereka tidak memiliki pengalaman voting pada pemilu sebelumnya, namun tidak mempunyai pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik.

Permasalahannya dalam hal ini perilaku pemilih pemula di kelurahan pekan Besitang sangatlah rendah tingkat partisipasinya dalam pemilihan Presiden pada tahun 2019. Ini disebabkan rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Terhadap pemilih pemula. Hal ini sangat di sayangkan sebab dapat merugikan perolehan suara dari kandidat pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang sangatlah rendah.

⁴⁵ Junaidi, Diaspora..., h. 66

Tanggapan beberapa pemilih pemula mewakili dari keseluruhan yang telah di wawancarai oleh peneliti.

Tabel.XI

Adapun wawancara pribadi terhadap pemilih pemula di Kelurahan Pekan Besitang sebagai berikut :

Nama	Alamat	Tanggapan	Keterangan
Andi Syahputra	Lingkungan II Pekan Kelurahan Besitang	Pemilihan pertama dilakukan. Dan menurutnya wajib untuk memilih.	Mahasiswa
Sabitha Magrifa	Lingkungan II Kelurahan Pekan Besitang	Tidak mengikuti pemilihan karena tidak memiliki KTP	Wiraswasta
Ahmad Rifai	Lingkungan I Kelurahan Pekan Besitang	Tidak ada dorongan untuk memilih,tidak memperdulikan pemilihan.	Wiraswasta
Riska Hardianti	Lingkungan I Kelurahan Pekan Besitang	Belum genap pada usia 17 tahun.	Mahasiswi

Dapat disimpulkan bahwa pada pemilihan Presiden tahun 2019 pemilih pemula di kelurahan Pekan Besitang sangat rendah dalam memilih. Sebagian beranggapan bahwa memilih tidak ada pengaruhnya bagi dirinya, dan ada juga yang memiliki kesadaran dalam memilih.

C. Faktor Pendukung Responden

Tabel.XII

Jumlah Pemilih Pilpres 2014 dan 2019

Tahun	Jumlah Peserta Pilpres	Jumlah Pemilih Pemula	Presentase Pemilih Pemula
2014	171.265.442	36.000.000	21,02
2019	188.244.161	40.000.000	21,24

Sumber: kpu.go.id, 2019.

Dalam hal ini penulis melihat beberapa fenomena pendukung yang terjadi di kalangan pemilih pemula khususnya di Kelurahan Pekan Besitang. Untuk menentukan sebuah pilihan khususnya dalam hal ini pilihan politik tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor pendukung. Proses menentukan sebuah pilihan dinilai memiliki pertimbangan tersendiri bagi setiap orang. Dalam pilihan politik merupakan bentuk perilaku sosiologis dimanaperilaku ini berpengaruh pada pilihan politik, khususnya pilihan politik pemilih pemula di

mana pemilih pemula cenderung akan mengikuti pilihan politik orangtuanya. Dalam politik kepartaian di Indonesia, agama adalah faktor yang dipercaya sangat penting mempengaruhi perilaku pemilih.

Hal ini didukung oleh hasil temuan penelitian yang megatakan kelompok sosial bisa terpetakan dengan berbagai macam kategori seperti kelas, agama, ideology, etnisitas, pekerjaan, gender dan lain-lain. Sudut pandang tersebut

ditentukan oleh latar belakang sosial-ekonomi dan anggota-anggota kelompok sosial.⁴⁶

Tabel. XIII

Adanya Kesamaan Suku, Agama dan Ras Merupakan Faktor Responden Memilih Salah Satu Kandidat

No	Jawaban	Frekuensi	%
1	Iya	6	20 %
2	Tidak	24	80 %
	Jumlah	30	100 %

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa responden tidak memilih kandidat berdasarkan dengan kesamaan suku, agama atau ras sekalipun. Hal ini dapat dilihat dari 30 responden sebanyak 24 responden menjawab bahwa ia tidak memilih berdasar kepada kesamaan suku, agama atau ras dengan presentase 80% jawaban “Tidak”. Sementara 6 diantaranya memilih berdasar atas kesamaan suku, agama, rasa tau asal daerah dengan presentase sebanyak 20%.

Dari data temuan tersebut ada indikasi dimana responden lebih memilih untuk mencari tahu secara objektif terlebih dahulu tentang profil atau informasi yang berkaitan dengan pasangan kandidat yang akan dipilih. Dari responden yang menjawab “Ya” sebagian besar melihat cara pandang orang tua responden yang berprinsip mengedepankan asal daerah yang sama karena dianggap mampu

⁴⁶ Ismanto, *Pemilihan Presiden Secara Langsung 2004 : Dokumentasi, Analisis dan Kritik*,(Jakarta: Kedepatian Bidang Dinamika Masyarakat Kemriatek, 2005), 133

merepresentasikan asal daerah atau suku salah satu kandidat. Selain itu adanya rasa kesamaan asal daerah dengan sisa atau orang tua responden juga menjadi faktor alasan pilihan politiknya lebih mengedepankan unsur kedaerahan.

D. Pandangan Politik Islam Terhadap Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kelurahan Pekan Besitang

Aspek politik Islam berasal dari qur'an, dan sunnah (perilaku dan ucapan Nabi Muhammad SAW), sejarah Muslim, dan elemen gerakan politik baik di dalam ataupun diluar Islam. Dalam arti yang lebih luas "politik" diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Deliar Noer "Politik" adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*).

Politik Islam adalah pengaturan urusan umat di dalam dan juga diluar negeri dengan hukum Islam, dengan melibatkan negara dengan umatnya, peraturan didalam maupun diluar negeri dan juga legilasinya bersumber dari hukum Islam. Pemimpin yang mengikuti syari'at dan juga kewenangan penguasa/pemerintah untu melakukan kebijakan-kebijakan politik yangmengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama ataupun yang bersumber dari hukum-hukum syari'at yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Alqurʻan maupun hadist secara eksplisit tidak menyebutkan apakah negara yang ingin dibentuk oleh umat Islam itu berbentuk republic ataupun kerajaan. Demikian pula apakah sistem yang di anut pada suatu negara apakah sistem Presidensial atau Parlemonter. Alqurʻan juga tidak menyinggung tentang mekanisme kekuasaan yang harus di anut apakah menggunakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) pembagian kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan juga legislative. Ketiga kekuasaan ini telah di praktikan oleh nabi Muhammad SAW ketika memimpin negara Madinah.⁴⁷

Di dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi kepala negara nabi Muhammad SAW dibantu oleh sahabatnya dalam melindungi dan juga mengayomi rakyatnya. Termasuk melakukan berbagai diplomasi politik di luar Negeri. Nabi SAW selalu mengayomi rakyatnya, memenuhi segala kebutuhan dan membawa mereka kearah yang lebih sejahtera. Adapun acuan yang dibawa oleh Nabi SAW adalah berdasarkan perjanjian yang ada pada konteks baiʻah al-„aqabah, dimana dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban secara berimbang antara kedua belah pihak.⁴⁸

Dalam keyakinan masyarakat Islam, alquran dan hadist diyakni pedoman umat manusia yang mengajarkan segala seluk beluk kehidupan manusia dan segala aspek kehidupan, antara lain dalam hal politik. Oleh itu Islam selalu disebut dengan *way of life* untuk orang-orang yang menyakininya, oleh karena itu bagi

⁴⁷ Katimin, *Politik Islam*...h. 1-5

⁴⁸ *Ibid*, h. 58

keyakinan dan ibadah umumnya alquran dan hadist selalu tegas dalam kajian yang lebih akurat lagi, dalam hal ini pandangan masyarakatan dan politik tatanegaraan dikaji alquran secara umum dan bersifat umum atau garis besarnya saja.

Wajib hukumnya mengangkat seorang pemimpin adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai imam (khalifah), maka gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardu kifayah.

Berikut tokoh pemikir politik Islam yang memiliki gagasan tentang bagaimana pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa politik itu memegang peranan penting bagi masyarakat. Politik mengajarkan mekanisme dalam mencapai keselarasan dunia dan akhirat. Politik juga dapat mempertahankan manusia dari agresi luar, Suversi dan infiltrasi. Tanpa kehidupan politik, kehidupan manusia dalam bermasyarakat tidak akan teratur.

Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa politik adalah persoalan kekuasaan. Kedudukan raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena memberikan kepada orang yang memegang kedudukan itu segala kekayaan duniawi, serta kepuasan lahir dan batin.

2. Al- Mawardi

Memahami pemikiran politik Al Mawardi ia selalu melandasi dengan kaidah-kaidah keislaman, yang sesuai ilmu ditekuninya. Maksudnya, Al Mawardi selalu berlandaskan pada hukum-hukum Islam.

Al Mawardi juga sangat berjasa dalam merumuskan gagasannya hingga dapat menjadi bahan rujukan kita saat ini dalam berpolitik.

Salah satu pandangan yang mendasar dari Al Mawardi yaitu hubungan antara Politik dan Agama, selain itu Al Mawardi berpendapat terbentuknya sebuah Negara, manusia sebagai makhluk sosial harus saling bekerjasama dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan dengan sendirinya tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Manusia hidup penuh keberagaman dan memiliki kemampuan serta saling bahu-membahu hingga sepakat untuk membangun sebuah Negara.

Allah swt telah menerangkan didalam Al Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai insan yang lemah, maka dengan kelemahan itu Allah menghendaki manusia untuk tidak bersikap angkuh, sombong serta egois.⁴⁹

Dalam pemikiran Al Mawardi, terbentuknya sebuah Negara itu memiliki enam sendi utama antara lain:

- a. Agama
- b. Pemimpin yang berkarisma
- c. Keadilan yang menyeluruh
- d. Keamanan yang kuat
- e. Kesuburan tanah
- f. Harapan (Generasi yang mendatang).

⁴⁹ Rashda Diana DKK, jurnal *etika politik* dalam perspektif Al Mawardi (<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsqafah>), h. 370

Pertama adalah Agama. Agama sangat berperan penting dalam kehidupan manusia bermasyarakat, agama mampu menaikkan semangat untuk membangun dalam melestarikan alam. Fungsi dari agama ialah mengontrol tingkah laku manusia serta hawa nafsunya, sehingga agama dapat menjadi dasar atau acuan dalam mensejahterahkan manusia.

Tiang kedua adalah Pemimpin Yang Berkharisma. Seorang pemimpin harus mampu menjaga tauladan bagi rakyatnya, maka kharismatik jadi bahan penting dalam pembentukan sebuah Negara. Pemimpin yang kharismatik mampu menghasilkan keadilan dan sejahtera, serta mampu melindungi setiap insan dan menjaga nama baik bangsa dan Negara.⁵⁰

Tiang ketiga Keadilan Bersifat Universal. Salah satu syarat menciptakan Negara yang damai dan rukun setiap warga Negara, pemimpin harus mampu bersikap berkeadilan yang tidak membeda-bedakan suatu kalangan dimasyarakat, hingga rakyat dapat menciptakan rasa menghormati terhadap pemimpin.

Tiang keempat Keamanan Yang Kuat. Dengan adanya keamanan yang kuat, dapat memberikan rasa aman bagi orang-orang yang lemah dan mampu mendongkrak jiwa yang kreatif dalam membangun bangsa. Ketika rakyat merasa aman, maka akan semakin taat terhadap seorang pemimpin.

Tiang kelima Kesuburan Tanah. Kebutuhan sandang dan pangan Negara sangat bergantung pada tingkat kesuburan tanah, hal ini merupakan syarat kesejahteraan rakyat sehingga dapat hidup yang layak dan tingkat konflik antar masyarakat berkurang.

⁵⁰ *Ibid*, h. 372

Tiang yang keenam adalah Harapan dan keinginan. Generasi mendatang adalah pewaris dari generasi terdahulu. Harapan bagi generasi saat ini dan dan berikutnya begitu bergantung pada pengaturan Negara dari sendi-sendi sebelumnya secara sistematis.

Dari keenam Tiang adalah bangunan penyangga untuk hidup bersosial dan dapat menjadi landasan untuk membangkitkan suatu komunitas sosial. Dengan adanya itu, tinggal konflik antar kelompok sosial berkurang dan politik jugamenjadi ancaman dari kelompok sosial yang lainnya.⁵¹

Dari pernyataan diatas nampaklah bahwa agama dan Negara berhubungan timbal balik atau dalam kata lain saling membutuhkan, jadi agama membutuhkan Negara hingga sebaliknya. Bersama Negara, agama dapat dapat berkembang dan Negara sangat membutuhkan agama agar nilai-nilai etika dan moral masih tetap tepatri didalam Negara tersebut.

3. Ibn Abi Rabi

Allah swt telah menerangkan didalam Al Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai insan yang lemah, maka dengan kelemahan itu Allah menghendaki manusia untuk tidak bersikap angkuh, sombong serta egois.

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan prilaku politik (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam gambaran politik Islam (Muslim) di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal

⁵¹ Rashda Diana DKK, jurnal *etika politik* dalam perspektif Al Mawardi...,h.373

dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut. Pertarungan seperti ini melibatkan “objektifikasi” pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan.⁵²

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai pemilihan pemula dalam hal keikutsertaan dalam memilih pemimpin. Yang mana perpaduan permasalahan ini dikaitkan adanya politik mengenai partisipasi pemilihan pemula dalam hal memilih pemimpin. Umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami. Pada pandangan ini agar dapat ikut melaksanakan dwifungsi, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan. Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan.

Dalam pembahasan mengenai partisipasi politik pemilihan pemula bahwasannya dalam PKPU No. 8 Tahun 2017 dijelaskan bahwasannya setiap pemilihan pemula wajib untuk memilih seorang calon pemimpin dalam pemilihan kepala negara. Dalam hal ini ditinjau dari syariahyah adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 Tahun 2017 telah sesuai dengan tujuan yakni mewajibkan pemilihan pemimpin demi tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan umat. Akan tetapi pemilihan pemula dalam pemilihan Presiden 2019 di Kelurahan Pekan Besitang tingkat partisipasinya cukup rendah sehingga tidak mengamalkan konsep dalam memilih pemimpin sesuai pada syariat dalam hal pencapaian kemaslahatan umat.

⁵² Azyumardi Azra, *Kata Pengantar* dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, Mizan, Bandung, 2005, Cet. 1. H.16

Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam al-Qur'an adalah yang pertama terwujudnya sebuah sistem politik, kedua berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan yang ketiga terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Al-Qur'an tidak mengemukakan secara eksplisit fungsi dan struktur dari sistem politik, namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan adanya unsur-unsur tersebut.

Allah berfirman dalam surah annisa ayat 59 :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْحُكْمِ الْمُنْتَهَىٰ
 وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْحُكْمِ الْمُنْتَهَىٰ

لَا	تَجِدُ أُمَّةَ	أَطَاعَتْ	اللَّهَ	وَأَطَاعَتْ	الرَّسُولَ	وَأَطَاعَتْ	أَرْوَاقَ	الْحُكْمِ	الْمُنْتَهَىٰ	وَأَطَاعَتْ	أَرْوَاقَ	الْحُكْمِ	الْمُنْتَهَىٰ	
لَا	تَجِدُ	أُمَّةَ	أَطَاعَتْ	اللَّهَ	وَأَطَاعَتْ	الرَّسُولَ	وَأَطَاعَتْ	أَرْوَاقَ	الْحُكْمِ	الْمُنْتَهَىٰ	وَأَطَاعَتْ	أَرْوَاقَ	الْحُكْمِ	الْمُنْتَهَىٰ
لَا	تَجِدُ	أُمَّةَ	أَطَاعَتْ	اللَّهَ	وَأَطَاعَتْ	الرَّسُولَ	وَأَطَاعَتْ	أَرْوَاقَ	الْحُكْمِ	الْمُنْتَهَىٰ	وَأَطَاعَتْ	أَرْوَاقَ	الْحُكْمِ	الْمُنْتَهَىٰ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْحُكْمِ الْمُنْتَهَىٰ.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya dn ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁵⁴

Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan dengansistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Konsepsi rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin.

⁵³ Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 290

⁵⁴ Q.S Annisa ayat 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama Partisipasi politik pemilih pemula di kelurahan pekan besitang sangatlah rendah, karena tingkat kepedulian dan juga ketidaktahuan sangatlah minim dalam mencari informasi mengenai pemilihan presiden tahun 2019. Kebanyakan dari pemilih pemula lebih mengutamakan pengetahuan yang ia dapatkan dari lingkungan daripada pengetahuan mengenai pemilu atau politik dari cara mencari tahu sendiri.

Kedua secara keseluruhan pertanyaan penelitian dan tujuan sudah terjawab. Temuan data sebagian besar menunjukkan bahwa pilihan politik pemilih pemula adalah pilihan rasional. Hal ini didukung oleh kebebasan yang diberikan dalam memilih yang diberikan oleh keluarga. Disamping itu, antusiasme yang dimiliki oleh pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu Presiden tahun 2019 dapat dikatakan rendah, padahal pemilu tersebut merupakan pemilu pertama bagi mereka.

Ketiga, penulis melihat adanya fenomena media sosial sebagai sumber informasi terpercaya bagi pemilih pemula untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang profil atau visi dan misi dari salah satu kandidat. Hal ini terlihat dari alasan yang diberikan oleh pemilih pemula. Penulis melihat dikelurahan pekan besitang pemilih pemula masih banyak yang tidak peduli dengan pemilu, dapat dikatakan golput adalah pilihan mereka. Masih terlalu

minimnya pengetahuan mereka dalam pemilihan umum dan rasa tidak ingin mengetahui bagaimana cara memilih.

B. Saran

Setelah penulis meneliti partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan Presiden 2019 di Kelurahan Pekan Besitang, maka penulis memberikan saran pemilih pemula diharapkan lebih sadar betapa pentingnya dalam memilih pada pemilu, mengetahui dan mengikutsertakan diri. Partisipasi dibutuhkan sebagai partisipasi independen dan bukan atas dasar di mobilitas atau adanya tujuan dari kelompok lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azra Azyumardi, Kata Pengantar” dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, Mizan, Bandung, 2005, Cet.1
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta:Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah,2005),h.25
- Hikmat M. Mahi, *Komunikasi Politik*, (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2010)
- Ismanto, *Pemilihan Presiden Secara Langsung.Kritik dan analisis*. (Jakarta: Kedeputan Bidang Dinamika Masyarakat, 2005).
- Junaidi, *Diaspora Etnis Jawa Perilaku Komunikasi dan Pilihan Politik*, (Yogyakarta; Bildung, 2020), h. 51
- Katimin, *Politik Islam Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing,2018)
- Katimin, *Politik Islam*, (Medan: Perdana Publishing,2017)
- Mujani Saiful, *Muslim Demokrat Islam, Budaya Demokrasi dan Partisipasi Politik*, (Jakarta: Gramedia. 2007)
- Notoatmodjo Soekidjo. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, (Jakarta:Rineka Cipta, 2007), h. 133
- Riza Faisal, *Partai Islam No, Politik Islam Yes*, (LKis : Yogyakarta,2019)
- Salim Mu’in Abdul, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada),2002.
- Santoso Topo dan Ida Budhiati, *Pemilu Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Sastroatmodjo Sujino, *Perilaku Politik*, (Semarang:IKIP Semarang Press,1955)
- Situmorang Jubair, *Etika Politik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Desember, 2016)
- Sudijno Sastroatmodjo, *Partisipasi Politik*,(Semarang :IKIP Semarang Press, 1955)
- Syahrin & Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Cita Pustaka Media, 2012)
- Tahqiq Nanang, *Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media 2004)

Jurnal :

Rashda Diana DKK, *jurnal Etika Politik dalam Perspektif Al-Mawardi*

Arya Wiguna, "Human of content", dalam abstrak Vol.20 No.1, 2020,

(Medan :ANRI)

Teti Estiasih, "pemilih pemula dalam pemilu", dalam berita arsip Vol.20

No.5, 2016,(Surabaya :ANRI)

Internet:

<http://muhammadzikra15blogspot.co.id> (03 Agustus 2020)

kpu.go.id, 2019

Wawancara :

Ahmad Rifai, Pemuda Kelurahan Pekan Besitang, wawancara pribadi,

Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

Andi Syahputra, Pemuda Kelurahan Pekan Besitang,

wawancara pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

Eva Santi, Pemudi Kelurahan Pekan Besitang, wawancara pribadi,

Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

Muhammad Habib Baihaqi, Pemuda Kelurahan Pekan Besitang,

wawancara pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

Sabita Magrifah, Pemudi Kelurahan Pekan Besitang,

Wawancara Pribadi, Kelurahan Pekan Besitang 14 Agustus 2020

Sumber data oleh Staff Kelurahan Pekan Besitang, Wawancara.

Pada 5 Agustus 2020

DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti berada di kantor Kelurahan Pekan Besitang



Peneliti bersama ibu Lurah Pekan Besitang



Bantuan sembako dari Polsek Besitang untuk masyarakat Kelurahan Pekan
Besitang



Foto Ibu Lurah, staff Kelurahan dan Kepala Lingkungan Kelurahan Pekan
Besitang



Kunjungan tim penilaian Kelurahan terbaik tingkat Kabupaten Langkat



Sosialisasi dan penyuluhan narkoba di polsek Besitang





Gotong royong masyarakat Kelrahan Pekan Besitang